



Ali Nur Yasin
ali@tempo.co.id

YOGYAKARTA — Pemerintah Kota Yogyakarta menyatakan perusahaan yang keberatan dengan upah minimum 2016 bisa meminta penangguhan paling lambat 15 Desember 2015. "Setelah lewat tenggat itu, penangguhan tak akan kami proses dan kami anggap semua setuju melaksanakan kebijakan upah baru," kata Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta Hadi Mochtar, kemarin.

Upah minimum 2016 Kota Yogyakarta telah ditetapkan sekitar Rp 1,45 juta, atau naik 11 persen dari upah tahun ini sekitar Rp 1,3 juta.

Pada awal pekan ini, pemerintah telah mengumpulkan 200 perusahaan skala sedang dan besar di Kota Yogyakarta dalam rangka sosialisasi upah tahun depan. Berdasarkan ketentuan pemerintah, penghitungan upah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015.

"Sejak sosialisasi belum ada yang mengajukan penangguhan karena keberatan," kata Hadi. "Tapi kami tetap tunggu sampai pertengahan Desember."

Dia menjelaskan, tenggat keberatan ditetapkan agar timnya punya cukup waktu untuk melakukan kajian lapangan di perusahaan. "Kalau alasan penangguhan dari kajian lapangan

TENGGAH PENGAJUAN KEBERATAN UPAH 2016 DESEMBER

Dua perusahaan retail mengajukan penangguhan upah.

akan ada dengan penghitungan yang baru sesuai dengan peraturan pemerintah ini. Jikapun ada, jumlah perusahaan yang mengajukan minim." Karena sangat rendah hasilnya (upah yang ditetapkan), dibanding daerah tetangga seperti Magelang dan Klaten, Jawa Tengah," kata dia.

Aliansi mengapresiasi pemerintah jika berani menindak tegas perusahaan yang lalai memenuhi kewajiban seperti membayar upah atau THR dengan melibatkan Dinas Ketertiban. "Meskipun penindakan oleh pemerintah itu bukan hal baru," ujarnya.

Menurut catatan buruh, selama ini perusahaan yang tak memenuhi kewajiban hampir tidak ada yang diseret ke ranah pidana. Paling mentok ditempuh penyelesaian secara perdata di pengadilan hubungan industrial. "Kami menunggu ketegasan itu," ujarnya.

Kepala Bidang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta Udiyono menjamin penegakan peraturan daerah ketenagakerjaan menjadi prioritas. Apalagi Dinas sudah mendapat rekomendasi dari Wali Kota Yogyakarta untuk menegakkan peraturan daerah.

"Urusan penegakan perda ketenagakerjaan jadi prioritas penanganan selain pengemplangan pajak. Ada tim sendiri PPNS yang dikerahkan jika ada temuan pelanggaran," ujar Udiyono.

● PRIBADI WICAKSONO

dan pembukuan keuangan mereka dinilai tak masuk akal, usulan jelas ditolak," ujar Hadi.

Pada tahun ini ada dua perusahaan skala besar bidang retail dengan jumlah buruh sekitar 100 orang yang meminta penangguhan penerapan upah minimum. Perusahaan tersebut diberi waktu enam bulan untuk melakukan penyesuaian. "Saran kami, kalau keberatan dengan upah, silakan mengajukan penangguhan. Jangan malah melakukan PHK (pemutusan hubungan kerja)," kata Hadi.

Menurut dia, keputusan merumahkan buruh berpotensi menimbulkan gugatan di pengadilan. "Dan merugikan perusahaan."

Dinas akan melibatkan sejumlah instansi lain, seperti Dinas Ketertiban, untuk menyelidiki dan menindak perusahaan yang tak menaati ketentuan upah. "Dinas Ketertiban saat ini sudah bisa mengurus bidang ketenagakerjaan," tutur Hadi.

Sekretaris Aliansi Buruh Yogyakarta, Kirnadi, memperkirakan penangguhan upah tidak

| Instansi | Nilai Berita | Sifat | Tindak Lanjut |
|--|--------------|-------|-----------------|
| 1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi | Netral | Biasa | Untuk Diketahui |

Yogyakarta, 06 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005